

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dinas Perhubungan



RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun 2023

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 22587, Email : dishubkepselayar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala karena atas berkat rahmatNya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan. Rencana kerja merupakan langkah awal menuju sistem perencanaan dan penganggaran yang baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana kerja dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah supaya pelaksanaan pembangunan daerah konsisten.

Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 ini sesuai Kedudukan, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang tentunya berdasarkan skala prioritas program/kegiatan dan besaran anggaran masing-masing program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan program/kegiatan bagi stakeholder di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa siberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman pelaksanaan program/kepentingan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	28
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	56
BAB V PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	13
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	28
Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar	31
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar	40
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.....	44
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar ...	49
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260 dimana Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun dan menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Sesuai dengan RKPD tahun 2023, Renja Perangkat Daerah juga difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 0202 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16, Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Secara substantif Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
- 11) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);

- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
- 32) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 185);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan tahun 2023; dan
4. Memeberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Melampirkan Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyajikan Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,
- Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan secara periodik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2023 merupakan Renja tahun ke dua pada periode Renstra 2022-2026. Sehingga evaluasi pelaksanaan Renja untuk tahun lalu (n-1) adalah tahun 2022 yang merupakan tahun awal periode Renstra. Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra hanya dilakukan pada periode Renstra yang sama, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi pada pelaksanaan Renja tahun 2021 karena tidak termasuk dalam tahun perencanaan sesuai periode Renstra. Selain itu, indikator kinerja sub kegiatan yang digunakan pada Renja tahun 2021 belum menggunakan indikator kinerja sesuai Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2021 revisi kedua.

Sama halnya dengan tahun 2021, Renja tahun 2022 serta perencanaan pada Renstra Dinas Perhubungan masih belum menggunakan indikator kinerja sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 revisi kedua sehingga perlu adanya penyesuaian dari indikator pada Renstra dengan Kepmendagri 050 Tahun 2021 agar diperoleh keseragaman antara perencanaan dan pelaksanaan serta memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Penyesuaian dan evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100					100		
						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100					100		
						Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100					100		
2	15	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100					75		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10					2		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5					1		
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5					1		
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5					1		
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKP	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5					1		
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, LKPJ dan LPPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15					3		
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5					1		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	100					90		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	305					61		
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5					1		
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10					4		
2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya RFK (Laporan)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60					12		
2	15	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM ASN	90					23		
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45					5		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasikan (Buah)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300					100		
2	15	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100					100		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang disediakan (Unit)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	276					51		
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44					4		
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Unit)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3065					613		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Spanduk yang dicetak (Lembar)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	720					144		
						Jumlah Foto Copy (Lembar)									
						Jumlah Jilid Dokumen (Eksamplar)									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran/Majalah (Eksamplar)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60				12		
						Jumlah Iklan Media Cetak dan Elektronik (Kali)								
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat (Dos)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60				12		
						Jumlah Makanan dan Minuman Tamu (Dos)								
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2193				311		
						Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi								
						Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi (Orang)								
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Unit)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	60							
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6							
2	15	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100					100		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480					96		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan (orang/bulan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	360					72		
						Tersedianya Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Orang/Bulan)									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	100				60		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PersentasePeningkatanUsia PakaiKendaraan DinasJabatanEselon II (%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5				1		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55				18		
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130				20		
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas GedungKantor yangdipelihara (m2)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5				1		
						Panjang Pagarkantor yangdipelihara (m)								
						Luas HalamanKantor yangdipelihara (m2)								
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	30,77				30,69		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02	2.01		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	52				52		
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Fasilitas Perlengkapan Jalan/Keselamatan Jalan, Kepadatan Lalu Lintas dan Moda Transportasi (Laporan)	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	120				24		
2	15	02	2.02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	52				52		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pasaran Jalan yang terbangun (Halte) (Unit)	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					5		
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota (LPJU) (Unit)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	570				21		
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota yang terpelihara (LPJU) (Unit)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1064				25		
2	15	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	89				89		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5					1		
2	15	02	2.05		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	52					52		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5					1		
2	15	02	2.06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	52							
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Fasilitas Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Rambu-Rambu Lalu Lintas/Guardrail) (Unit)	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	19							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Penertiban Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru Perayaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan dan Event Daerah (Kegiatan)	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60							
2	15	02	2.07		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	Persentase Tingkat Keterpenuhan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	52					52		
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin untuk Kelancaran Lalu Lintas (Laporan)	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12					4		
2	15	02	2.08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Tingkat Keterpenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Tingkat Keterpenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						20		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Kepmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten (Laporan)	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						4		
2	15	02	2.12		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan						20		
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						4		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	73,78					55,73		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	03	2.02		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten yang diterbitkan	Persentase Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten yang diterbitkan						20		
2	15	03	2.02	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat kewenangan Kabupaten Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						1		
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten (Kali)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota						12		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Kepmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	03	2.05		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan	Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan						20		
2	15	03	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten (Kali)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						12		
2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan						20		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Keppmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	15	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Dokumen FS Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				2		
2	15	03	2.12		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	52			52		
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan / Revitalisasi / Rehabilitasi / Penambahan Panjang Tambatan Perahu (Unit)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	31			15		
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Operasional UPTD Pamatata, UPTD Pelabuhan Laut Lokal (%)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	15			3		
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	100					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) Sesuai Kepmendagri 050 Th 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	04	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	100							
2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Tersedianya Fasilitasi Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter (Dokumen)	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	4							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Nilai SAKIP OPD				57,00	60,00	65,00		54,41	60,00	65,00	
2	Perencanaan Kinerja				18,72	18,95	19,95		22,01	18,95	19,95	
3	Pengukuran Kinerja				14,95	16,47	17,47		12,50	16,47	17,47	
4	Pelaporan Kinerja				10,80	11,00	12,00		9,21	11,00	12,00	
5	Evaluasi Internal				4,26	4,88	5,88		3,33	4,88	5,88	
6	Pencapaian Kinerja				8,27	8,70	9,70		7,35	8,70	9,70	
7	Indeks Kepuasan Layanan				60,00	65,00	70,00		58,13	65,00	70,00	
8	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP				Sesuai	Sesuai	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai	
9	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten				4,76	5,59	6,41		2,67	5,59	6,41	
10	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB				13,50	14,00	15,00		1,21	14,00	15,00	

Sesuai dengan tabel capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan di atas, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki realisasi capaian untuk pelaksanaan 5 (lima) tahun sebelum tahun perencanaan. Antara lain, Kinerja lalu lintas kabupaten dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 0,10 hal ini disebabkan oleh tidak adanya data arus lalu lintas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 karena tidak pernah dilakukan survei arus lalu lintas, indikator Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan merupakan indikator yang baru di rencanakan pada periode Renstra 2021-2026 sehingga belum dapat diukur sejauh mana capaian kerjanya. Untuk Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi dengan capaian yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sementara tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,13 poin dari tahun sebelumnya.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati – Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS diketahui permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

- a. Tata Kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal.
- b. Pelayanan satu pintu penertiban Izin perhubungan belum berjalan maksimal.
- c. Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya.
- d. Belum adanya studi beberapa Pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun.
- e. Masih minimnya keberadaan rambu-rambu perlengkapan jalan.
- f. Belum tersedianya alat uji kendaraan bermotor.

Sedangkan Faktor Penghambat yaitu :

- a. Keterbatasan atau kurangnya ketersediaan alokasi dana APBD;
- b. Masih banyaknya usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan yang belum atau tidak terakomodir dalam penetapan APBD, APBD Provinsi, dan APBN;

- c. Belum optimalnya pengelolaan data bidang perhubungan;
- d. Masih belum tercapainya pelayanan sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Masih kurangnya pelayanan manajemen angkutan umum.

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan jalan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana Keselamatan Pelayaran;
- c. Pengadaan sarana Alat Uji Kendaraan;
- d. Peningkatan pemerataan aksesibilitas pelayanan transportasi;
- e. Peningkatan pergerakan penumpang dan barang dari daratan ke kepulauan dan sebaliknya;
- f. Peremajaan angkutan desa;
- g. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan / balai uji.
- h. Pengadaan sistem informasi transportasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan melalui capaian kinerja, capaian pelaksanaan program dan kegiatan, namun karena tahun perencanaan Renstra yaitu 2022-2026 sehingga belum dapat dilakukan analisa terhadap capaian tahun sebelum Renja yang merupakan tahun pertama Renstra. Olehnya itu, review Renstra dilakukan dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					10.643.739.793					9.544.269.025	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	7.430.342.493	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja	70,28%	5.800.256.725	
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	85%		
			Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%							
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	87	36.000.000	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	91	23.240.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.240.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pematkhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4.875.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pematkhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pematkhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.875.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	4.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua- Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya LAKIP, LKPJ dan LPPD (Laporan)	3 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	95%	5.078.324.142	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	97%	4.297.330.725	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	61 Orang	5.054.474.142	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	4.282.330.725	- Perubahan Indikator dan target Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua; - Adanya perpindahan PNS ke PD lain dan berkurangnya standar nilai TPP
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.000.000	Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya RFK (Laporan)	1 Laporan	8.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM ASN	32%	50.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM ASN		-	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kepulauan Selayar	Persentase Pegawai yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			- Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	541.125.951	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	404.886.000	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Alat Listrik yang disediakan (Unit)	50 Unit	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua; - Kondisi bangunan yang sudah tua sehingga butuh perbaikan komponen instalasi listrik
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	6 Unit	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			- Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Unit)	613 Unit	36.565.951	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	34.680.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pemindahan anggaran operasional pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT Pelabuhan penyeberangan Pattumbakang ke Anggaran Operasional Dinas Perhubungan
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Spanduk yang dicetak (Lembar)	8 Lembar	11.540.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.132.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan
			Jumlah Foto Copy (Lembar)	23050 Lembar							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Jumlah Jilid Dokumen (Eksamplar)	136 Eks							ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
4.5	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Langganan Koran/Majalah (Eksamplar)	2000 Eks	30.000.000	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	121.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
			Jumlah Iklan Media Cetak dan Elektronik (Kali)	9 Kali							
4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat (Dos)	350 Dos	25.020.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.008.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
			Jumlah Makanan dan Minuman Tamu (Dos)	700 Dos							
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah	250 Orang	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	225.066.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
			Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi	96 Orang							
			Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi (Orang)	30 Orang							
4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Unit)	1 Unit	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			- Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	1.368.220.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	751.230.000	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Selayar	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	132.950.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	130.902.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Selayar	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan (orang/bulan)	72 Orang/Bulan	1.235.270.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	620.328.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Keppmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
			Tersedianya Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan (Orang/Bulan)	211 Orang/Bulan							
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	70%	356.672.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	80%	323.570.000	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Selayar	Persentase Peningkatan Usia Pakai Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II (%)	100%	38.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.630.000	Perubahan Indikator dan target Kinerja Sesuai Keppmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (unit)	11 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	246.920.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Keppmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua- Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Unit)	25 unit	18.042.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	18.020.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Keppmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (m2)	10 m2	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000	- Perubahan Indikator dan target Kinerja Sesuai Keppmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Kondisi Atap Bangunan Kantor yang Sudah Tidak Layak dan Butuh di Rehabilitasi - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
			Panjang Pagar Kantor yang dipelihara (m)	35 m							
II	Program Penyelenggaraan		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	30,77	1.697.999.200	Program Penyelenggaraan		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	30,77	734.146.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	52%	50.000.000	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	52%	35.000.000	
1.1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar	Tersusunnya Data Fasilitas Perengkapan Jalan/Keselamatan Jalan, Kepadatan Lalu Lintas dan Moda Transportasi (Laporan)	1 Laporan	50.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	49 Laporan	35.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
2	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	52%	650.000.000	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	52%	532.500.000	
2.1	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota (LPJU) (Unit)	90 Unit	275.000.000	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	13 Unit	262.500.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua- Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota yang terpelihara (LPJU) (Unit)	188 Unit	375.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	83 Unit	270.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
3	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	89%	70.000.000	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	89%	66.646.000	
3.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal (Unit)	1 Unit	70.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	66.646.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu		Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	52%	375.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan	52%	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		untuk Jaringan Jalan Kabupaten			untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten			
5.1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Kepulauan Selayar	Tersedianya Fasilitas Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Rambu-Rambu Lalu Lintas/Guardrail) (Unit)	3 Unit	250.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	39 Unit	20.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
5.2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar	Penertiban Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru Perayaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan dan Event Daerah (Kegiatan)	12 Kegiatan	125.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	80.000.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
6	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Tingkat Keterpenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	52%	17.999.200	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Tingkat Keterpenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	52%	-	
6.1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Kepulauan Selayar	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin untuk Kelancaran Lalu Lintas (Laporan)	1 Laporan	17.999.200	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan		- Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
III	Program Pengelolaan Pelayaran		Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	100%	1.510.398.100	Program Pengelolaan Pelayaran		Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	60,66%	2.795.470.300	
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	52%	1.510.398.100	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	52%	2.795.470.300	
1.1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Pembangunan / Revitalisasi / Rehabilitasi / Penambahan Panjang Tambatan Perahu (Unit)	6 Unit	1.215.000.000	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	8 Unit	2.671.947.300	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Penambahan pembangunan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
											tambahan perahu terutama dalam mendukung pengembangan KEK
1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Kepulauan Selayar	Persentase Keterpenuhan Operasioanl UPTD Pamatata, UPTD Pelabuhan Laut Lokal (%)	94,40%	295.398.100	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	123.523.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19
IV	Program Pengelolaan Penerbangan		Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	100%	5.000.000	Program Pengelolaan Penerbangan		Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	100%	214.396.000	
1	Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter		Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	1 Dokumen	5.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter		Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	1	214.396.000	
1.1	Fasilitasi Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Kab. Kepulauan Selayar	Tersedianya Fasilitas Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter (Dokumen)	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitas Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	214.396.000	- Perubahan Indikator Kinerja Sesuai Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua - Penambahan anggaran adalah anggran retensi dari tahun 2022

Dari rancangan awal RKPD sesuai dengan program dan kegiatan yang selanjutnya dikorelasikan dengan program dan kegiatan Renstra, secara keseluruhan sub kegiatan mengalami perubahan indikator kinerja dan sebagian mengalami perubahan target kinerja. Hal ini, disebabkan adanya penyesuaian dengan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2021 pemutakhiran kedua dimana dalam keputusan tersebut telah ditetapkan kinerja dan indikator kinerja setiap sub kegiatan. Sementara untuk pengurangan anggaran terjadi karena adanya pengalihan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Hal ini juga berdampak pada penghapusan beberapa sub kegiatan dari rancangan sesuai Renstra yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan dengan demikian, rencana kerja diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan bidang perhubungan yang tentunya sepanjang anggaran mampu mengakomodir memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menselaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD yang tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
a	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
	- Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Jalan Lingkar Pulau Jampea	Kec. Pasimasunggu Kec. Pasimasunggu Timur			Forum OPD
	- Pengadaan LPJU Solar Cell Jalan Lingkar Pulau Jampea	Kec. Pasimasunggu Kec. Pasimasunggu Timur			Forum OPD
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Dusun Balang-Balang, Desa Maharaya, Kec. Bontomatene			Musrenbang Kecamatan
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Desa Menara Indah, Kec. Bontomatene			Musrenbang Kecamatan
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Benteng, Kec. Benteng			Musrenbang Kecamatan
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Desa Tanamalala, Kec. Pasimasunggu			Musrenbang Kecamatan
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Desa Kalepadang, Kec. Bontoharu			Musrenbang Kecamatan
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu			Musrenbang Kecamatan
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Desa Kahu-Kahu, Kec. Bontoharu			Musrenbang Kecamatan
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Desa Garaupa, Kec. Pasilambena			Musrenbang Kecamatan
	- Pengadaan/ Pemeliharaan LPJU Solar Cell	Desa Bontojati, Kec. Pasimasunggu Timur			Musrenbang Kecamatan
II	Program Pengelolaan Pelayaran				
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				
a	Sub Kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	9 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Lambego	Kec. Pasimarannu			Forum OPD
	- Rehabilitasi/Penambahan Panjang Tambatan Perahu Labuang Pakangkang	Kec. Pasimasunggu			Forum OPD
	- Rehabilitasi Tambatan Perahu Sambali	Kec. Pasimarannu			Forum OPD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	- Pembangunan Tambatan Perahu Tangnga - Tangnga Kel. Bontobangung	Kec. Bontoharu		300 M	Musrenbang Kecamatan
	- Pembangunan Tambatan Perahu Gusung Lengu	Kec. Bontoharu		100 M	Musrenbang Kecamatan
	- Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Lappe Desa Tambolongan	Kec. Bontosikuyu			Musrenbang Kecamatan
	- Penambahan Panjang Tambatan Perahu Tanjung Lasore Desa Tanamalala	Kec. Pasimasunggu		20 M	Musrenbang Kecamatan
	- Penambahan Panjang Tambatan Perahu Desa Polassi	Kec. Bontosikuyu			Musrenbang Kecamatan
	- Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Tanjung Lasore	Kec. Pasimasunggu		85 M	Musrenbang Kecamatan
	- Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Balabara Desa Appatanah	Kec. Bontosikuyu			Musrenbang Kecamatan
2	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				
a	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	Musrenbang Kecamatan
	- Penyusunan Study Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Dermaga	Desa Pulo Madu, Kec. Pasilambena		1 Dokumen	Musrenbang Kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Adapun Sasaran Strategis berdasarkan Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi;
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum;
5. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten;
6. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan;
7. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian;

8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik.

Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan adalah sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah berupa dukungan pendanaan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut terutama di wilayah kepulauan guna mendorong pengembangan konektivitas antarpulau, antarkecamatan dan antardesa guna untuk mendukung terwujudnya kawasan pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia, pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan kawasan ekonomi khusus (KEK);
2. Pengadaan sarana transportasi seperti angkutan penyeberangan dalam rangka memberikan pelayanan aksesibilitas dan mobilitas yang merata terhadap masyarakat, angkutan umum untuk menjangkau wilayah-wilayah pedesaan, serta angkutan khusus untuk kawasan pariwisata guna mendukung peningkatan pembangunan sektor pariwisata; dan
3. Pembangunan dan pengelolaan, sarana, prasarana, dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**. Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026, dimana pelayanan Dinas

Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026, yaitu :

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan ke-1** : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan **sasaran ke-1**, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1).

Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-4, terkait dengan **tujuan ke-4** : mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-4) dengan **sasaran ke-7**, yaitu meningkatnya usaha pariwisata (S-7), dan **sasaran ke-8**, yaitu meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan (S-8).

Dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026 yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Perhubungan seperti yang dikemukakan di atas maka dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun, dimana pada tahun 2023 tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP OPD	60 (B)
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Perencanaan Kinerja	18,95
			Pengukuran Kinerja	16,47
			Pelaporan Kinerja	11
			Evaluasi Internal	4,88
			Pencapaian Kinerja	8,7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	65%		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai		
2.	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Usaha Pariwisata	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	5,59%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
-1	-2	-3	-4	-5
3.	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Transportasi	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	14,00%

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah sesuai yang telah ditentukan dan diarahkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih terdiri dari dua program besar yakni Program Strategis dan Program Prioritas. Program Prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu:

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL)

Program Strategis Pembangunan Distribusi Logistik (PDL) akan berpusat di Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene dan sekitarnya. Kawasan PDL di Pamatata dan sekitarnya tersebut terdiri dari 3 (tiga) zona pengembangan, masing-masing zona distribusi, zona pelabuhan/petikemas, dan zona industri. Sementara itu tahapan pengembangan dibagi juga kedalam 3 (tiga) tahapan besar, masing-masing tahapan pembentukan, tahapan pembangunan, dan tahapan pengelolaan.

Secara kewilayahan, Kawasan Pusat Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub Kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.

- b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
- c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
- d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

2. Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Program Strategis Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata akan dipusatkan di Pulau Pasi Gusung dan Matalalang dengan luasan 7.1600.000 m². Lokasi ini merupakan lokasi yang telah diusulkan ke Dewan KEK Nasional, yang berarti pembangunan dalam lokasi KEK akan dilakukan oleh konsorsium pengusul dan pembangunan di luar KEK akan dilakukan melalui pendanaan pemerintah dengan dukungan APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Program Strategis Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) akan berpusat di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu. Kawasan KIPT terdiri dari 5 (lima) zona pengembangan, masing-masing zona pemberdayaan, zona industri ikan hidup, zona distribusi ikan beku, zona industri produk akhir, dan zona industri berbahan baku ikan.

Secara kewilayahan, Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
- b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
- c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea.
- d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dalam hal ini nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dipilih masing-masing 5 (lima) desa sasaran untuk pembangunan desa wisata, desa

nelayan, desa tani, dan desa koperasi, usaha kecil menengah, melalui parameter sesuai latar belakang potensi wilayah yang dimiliki masing-masing desa termasuk kesiapan sumberdaya masyarakatnya. Adapun desa-desa yang tercakup dan terpilih sebagai desa pengembangan antara lain:

- a. Desa Wisata : Desa Menara Indah, Bontomarannu, Bahuluang, Patilereng, Polassi.
- b. Desa Koperasi dan UMKM : Desa Bahuluang, Bontosunggu, Bungaiya, Bontomarannu, Appatanah.
- c. Desa Nelayan : Bontosunggu, Bonea, Mekar Indah, Appatanah, Ujung.
- d. Desa Tani : Pengembangan Kampong Munte, Desa Maharayya, Onto, Kohala, Lantibongan, Tamalanrea, Bontotangga, Kaburu, Bontolembangan, Batangmata Sapo, Laiyolo Baru. Pengembangan Padi, Desa Ujung, Kembangragi, Bontobulaeng, Bontosaille, Bontomalling, Labuang Pamajang, Lembang Baji, Ma'minasa, Bontobaru, Teluk Kampe. Pengembangan Palawija, Desa Kayuadi, Bonerate, Kalaotoa, Bonea Timur, Lowa. Pengembangan Peternakan, Desa Bungaiya, Binanga Sombaiyya, Nyiur Indah, Tanamalala, Bonerate.

5. Program RPJMD

Adapun program pembangunan daerah pada sektor Perhubungan, adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 3) Program Pengelolaan Pelayaran; dan
- 4) Program Pengelolaan Penerbangan.

Program pembangunan daerah tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun serta disusun dalam perencanaan tahunan.

Secara keseluruhan rencana kerja tahun 2023 terdiri dari program sebanyak 4 (empat) program, kegiatan sebanyak 11 kegiatan, dan sub kegiatan sebanyak 31 sub kegiatan. Secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terfokus pada Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatannya dilaksanakan di Kecamatan Benteng, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pelaksanaannya

tersebar ke beberapa kecamatan, seperti pada sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota tersebar ke Kecamatan Daratan dan Kecamatan Kepulauan, selain itu juga pada sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota pelaksanaannya terkadang dilaksanakan di kabupaten lain atau bahkan di provinsi lain. Pada program Pengelolaan Pelayaran pada sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal lokasi pelaksanaannya tersebar ke kecamatan daratan dan kecamatan kepulauan.

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023, terdapat perbedaan indikator kinerja karena adanya Kepmendagri 050 Tahun 2021 pemutakhiran ke dua, selain itu terdapat pula perbedaan jumlah pagu indikatif dari rancangan awal RKPD karena adanya pengurangan anggaran dalam rangka pengalihan dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Selengkapnya rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan
Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.494.821.725			9.910.752.337			
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja		70,28%	5.800.256.725		100%	7.422.423.823			
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan		85%			100%				
2	15	01	2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Kinerja Dinas Perhubungan	91	23.240.000	DAU	91	36.000.000		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja Dinas Perhubungan	Benteng	6 Dokumen	4.240.000	DAU	2 Dokumen	7.500.000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA Dinas Perhubungan	Benteng	1 Dokumen	3.500.000	DAU	1 Dokumen	4.875.000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA Dinas Perhubungan	Benteng	1 Dokumen	3.500.000	DAU	1 Dokumen	4.375.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPA Dinas Perhubungan	Benteng	1 Dokumen	3.500.000	DAU		1 Dokumen	4.875.000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA Dinas Perhubungan	Benteng	1 Dokumen	3.500.000	DAU		1 Dokumen	4.375.000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ dan LPPD Dinas Perhubungan	Benteng	3 Laporan	5.000.000	DAU		3 Laporan	10.000.000
2	15	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	Laporan Keuangan Dinas Perhubungan		97	4.297.330.725			97	5.080.774.000
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	Benteng	57 Orang/Bulan	4.282.330.725			57 Orang	5.054.424.000
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	Benteng	2 Laporan	5.000.000	DAU		2 Laporan	8.850.000
2	15	01	2.02	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RFK Dinas Perhubungan	Benteng	12 Dokumen	5.000.000	DAU		12 Dokumen	7.500.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LKPJ Dinas Perhubungan	Benteng	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	10.000.000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Administrasi Dinas Perhubungan		100%	404.886.000			100%	576.757.423
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Aparatur Dinas Perhubungan	Benteng	7 Paket	3.000.000	DAU		55 Paket	3.850.000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Aparatur Dinas Perhubungan	Benteng	29 Paket	34.680.000	DAU		613 Paket	36.167.423
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Aparatur Dinas Perhubungan	Benteng	3 Paket	11.132.000	DAU		144 Paket	11.540.000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Aparatur Dinas Perhubungan	Benteng	12 Dokumen	121.000.000	DAU		12 Dokumen	30.000.000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu Dinas Perhubungan	Benteng	12 Laporan	10.008.000	DAU		12 Laporan	29.050.000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PNS dan PTT	Dalam dan Luar Daerah	150 Laporan	225.066.000	DAU		456 Laporan	470.000.000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Aparatur dan Tamu Dinas Perhubungan		100%	751.230.000			100%	1.368.220.400

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Benteng	36 Laporan	130.902.000	DAU		96 Laporan	132.950.000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pejabat Pengelola Keuangan dan PTT	Benteng	72 Laporan	620.328.000	DAU		72 Laporan	1.235.270.400
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80%	323.570.000			80%	360.672.000
2	15	01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung kantor	Benteng	2 Unit	20.000.000	DAU		1 Unit	50.000.000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional	Benteng	21 Unit	246.920.000	DAU		11 Unit	250.000.000
2	15	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mobil Jabatan	Benteng	1 Unit	38.630.000	DAU		1 Unit	38.630.000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan gedung kantor	Benteng	18 unit	18.020.000	DAU		28 unit	22.042.000
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota			30,77	731.646.000			30,85	935.000.000
2	15	02	2.01		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Rencana Induk Jaringan LLAJ		52%	35.000.000	DAU		52%	50.000.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Masyarakat	Benteng	49 Laporan	35.000.000	DAU		24 Laporan	50.000.000
2	15	02	2.02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Perlengkapan Jalan		52%	530.000.000			52%	670.000.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rambu Lalu Lintas dan Guardrail, pengguna jalan dan pemilik angkutan	Kec. Daratan	13 Unit	260.000.000 262.500.000 -2.500.000	DAU		90 Unit	295.000.000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rambu Lalu Lintas, LPJU dan Traffic Light	BentengKec. Daratan	83 Unit	270.000.000	DAU		188 Unit	375.000.000
2	15	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Angkutan Benteng		89%	66.646.000			89%	90.000.000
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	UPTD Terminal dan Perpustakaan	Benteng	1 Unit	66.646.000	PAD		1 Unit	90.000.000
2	15	02	2.06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Lalu Lintas Angkutan Jalan		52%	100.000.000			52%	125.000.000
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Lalu Lintas Jalan	Benteng	39 Unit	20.000.000	DAU		3 Unit	250.000.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Angkutan Lebaran, Natal Tahun Baru, Perayaan hari Besar Kenegaraan/Keagamaan dan Event Daerah	Benteng	12 Laporan	80.000.000	DAU		12 Laporan	125.000.000
2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi			60,66	2.748.523.000			63,94	1.548.203.364
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Masyarakat		52%	2.748.523.000			52%	1.548.203.364
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Masyarakat	Kec. Daratan dan Kepulauan	8 Unit	2.625.000.000	DAU		6 Unit	1.250.000.000
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata, UPTD Pelabuhan Penyeberngan Pattumbukang, UPTD. Pelabuhan Laut Lokal serta rambu suar	Pamatata dan Pattumbukang dan jampea	3 Unit	123.523.000	PAD		3 Unit	298.203.364
2	15	04			Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter			100%	214.396.000			100%	5.125.150
2	15	04	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Masyarakat		1 Dokumen	214.396.000			1 Dokumen	5.125.150

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	Masyarakat	Benteng	1 Dokumen	214.396.000	DAU		1 Dokumen	5.125.150

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Selain itu, rencana kerja juga merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah direncanakan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dimana Dinas Perhubungan mengampu strategi dan arah kebijakan, yaitu Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi sistem pelayanan publik, Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya unggulan.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ditetapkan program yang akan menjadi alat pelaksanaan dalam pencapaian prioritas pembangunan tersebut dengan menilai capaian indikator kinerja setiap program. Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program kegiatan memiliki tolak ukur keberhasilan berupa indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Untuk memudahkan dalam identifikasi dan evaluasi pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana Tabel TC.33, selanjutnya dibuat rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap triwulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2024

Dinas Perhubungan

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja Tahun 2024				
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
1	2	3	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7			
2															
2	15					4.270.238.732		4.288.738.731		4.322.618.731		4.723.514.731			
2	15	01													
2	15	01				70,28%	1.445.124.182	1.427.624.181		1.428.504.181		1.499.004.181			
2	15	01	2.01												
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.120.000	3 Dokumen	2.120.000			6 Dokumen	4.240.000	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	3.500.000		1 Dokumen	3.500.000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	3.500.000		1 Dokumen	3.500.000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	3.500.000		1 Dokumen	3.500.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif								
1					2	3	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000							3 Laporan	5.000.000
2	15	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	97	1.076.832.682		1.074.332.681		1.071.832.681		1.074.332.681		4.297.330.725
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	1.070.582.682	57 Orang/Bulan	1.070.582.681	57 Orang/Bulan	1.070.582.681	57 Orang/Bulan	1.070.582.681	57 Orang/Bulan	4.282.330.725
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	2.500.000			1 Laporan	2.500.000	2 Laporan	5.000.000
2	15	01	2.02	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	1.250.000	12 Dokumen	5.000.000						
2	15	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000							1 Laporan	5.000.000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25%	82.471.500	25%	82.471.500	25%	82.471.500	25%	157.471.500	100%	404.886.000
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	750.000	2 Paket	750.000	1 Paket	750.000	2 Paket	750.000	7 Paket	3.000.000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8.670.000	7 Paket	8.670.000	7 Paket	8.670.000	7 Paket	8.670.000	29 Paket	34.680.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif								
1					2	3	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.783.000	1 Paket	2.783.000		2.783.000	1 Paket	2.783.000	3 Paket	11.132.000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11.500.000	3 Dokumen	11.500.000	3 Dokumen	11.500.000	3 Dokumen	86.500.000	12 Dokumen	121.000.000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	2.502.000	12 Laporan	10.008.000						
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	56.266.500	37 Laporan	56.266.500	38 Laporan	56.266.500	38 Laporan	56.266.500	150 Laporan	225.066.000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25%	187.807.500	25%	187.807.500	25%	187.807.500	25%	187.807.500	100%	751.230.000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	32.725.500	36 Laporan	130.902.000						
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	155.082.000	72 Laporan	620.328.000						
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	20%	90.892.500	20%	80.892.500	20%	75.892.500	20%	75.892.500	80%	323.570.000
2	15	01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	1 Unit	5.000.000					2 Unit	20.000.000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	61.730.000	5 Unit	61.730.000	5 Unit	61.730.000	6 Unit	61.730.000	21 Unit	246.920.000
2	15	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9.657.500		9.657.500		9.657.500	1 Unit	9.657.500	1 Unit	38.630.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif								
1					2	3	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4.505.000	4 unit	4.505.000	5 unit	4.505.000	5 unit	4.505.000	18 unit	18.020.000
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	30,77	122.286.500	30,77	158.286.500	30,77	191.286.500	30,77	307.286.500	30,77	734.146.000
2	15	02	2.01		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	13%	8.750.000	13%	8.750.000	13%	8.750.000	13%	8.750.000	52%	35.000.000
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Laporan	8.750.000	12 Laporan	8.750.000	12 Laporan	8.750.000	13 Laporan	8.750.000	49 Laporan	35.000.000
2	15	02	2.02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	13%	71.875.000	13%	92.875.000	13%	125.875.000	13%	241.875.000	52%	532.500.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		4.375.000		25.375.000	3 Unit	58.375.000	10 Unit	174.375.000	13 Unit	262.500.000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	21 Unit	67.500.000	21 Unit	67.500.000	21 Unit	67.500.000	20 Unit	67.500.000	83 Unit	270.000.000
2	15	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	22,25%	16.661.500	22,25%	16.661.500	22,25%	16.661.500	22,25%	16.661.500	89%	66.646.000
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		16.661.500		16.661.500		16.661.500	1 Unit	16.661.500	1 Unit	66.646.000
2	15	02	2.06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	13%	25.000.000	13%	40.000.000	13%	40.000.000	13%	40.000.000	52%	100.000.000
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Unit	5.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	9 Unit	20.000.000	39 Unit	20.000.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif								
1					2	3	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	20.000.000	12 Laporan	80.000.000
2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi		2.702.828.050		2.702.828.050		2.702.828.050	60,66	2.702.828.050	60,66	2.795.470.300
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	52%	2.702.828.050	52%	2.702.828.050	52%	2.702.828.050	52%	2.702.828.050	52%	2.795.470.300
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		2.671.947.300		2.671.947.300		2.671.947.300	8 Unit	2.671.947.300	8 Unit	2.671.947.300
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		30.880.750		30.880.750		30.880.750	3 Unit	30.880.750	3 Unit	123.523.000
2	15	04			Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter		-		-		-	100%	214.396.000	100%	214.396.000
2	15	04	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter		-		-		-	1 Dokumen	214.396.000	1 Dokumen	214.396.000
2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan TempatTinggal Landas dan Mendarat Helikopter yangDiterbitkan							1 Dokumen	214.396.000	1 Dokumen	214.396.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan sinkronisasi arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan antartingkatan pemerintahan, yakni Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, sehingga diharapkan ada keselarasan antara tema dan prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tema dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan maupun tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Rencana anggaran program dan kegiatan yang termuat dalam Renja ini merupakan perhitungan sesuai kebutuhan pelaksanaan masing-masing kegiatan dan diharapkan nantinya dapat terealisasi dalam dokumen APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan pendanaan kegiatan dalam Rencana Kerja kadang tidak terealisasi sesuai dengan pagu kebutuhan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar yang juga dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada sektor lain dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Jika hal tersebut terjadi, maka diharapkan agar pengurangan anggaran dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan penunjang dan tidak pada kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab dari seluruh jajaran pejabat dan staf Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar serta peran aktif stakeholder yang terkait dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pemanfaat sekaligus pengawas pelayanan pada bidang perhubungan.

Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang perhubungan sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar secara Bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan tahun anggaran 2023 berdasarkan Renja Tahun 2023 dengan berpedoman pada standar biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, Badan Perencanaan dan Penelitian Penguasaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan Renja tahun 2023 dalam keterkaitannya dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, untuk itu Dinas Perhubungan berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Renja setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Perencanaan dan Penelitian Penguasaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Semoga Renja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023.

Benteng, 2 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196707051994031020